

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 332-346**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8386319)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386319>

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara**

**Rida Arnisah<sup>1</sup>, Mustafa Khamal Rokan<sup>2</sup>, Kusmilawaty<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Email:** [rarnisah@gmail.com](mailto:rarnisah@gmail.com)<sup>1</sup>, [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [kusmilawaty@uinsu.ac.id](mailto:kusmilawaty@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Fungsi Pemeriksaan Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Sebagai responden adalah 35 pegawai di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara yang dipilih dengan metode sampel jenuh. Instrumen penelitian ini adalah kuisioner dengan skala likert. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika terdapat peningkatan akuntabilitas, maka akan mampu memberikan dampak peningkatan pada kinerja pemerintahannya. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan transparansi maka akan berdampak pada kinerja pemerintahan. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika terdapat peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, maka akan mampu memberikan dampak peningkatan pada kinerja pemerintahannya. Pemeriksaan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika walaupun pemeriksanaan internal dilaksanakan secara intensif, maka tidak akan memberikan perubahan pada kinerja pemerintahannya. Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksanaan Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Adapun besar pengaruh dari koefisien determinasinya adalah 63,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan berada pada kondisi yang kuat.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi, Pemeriksaan internal, dan Kinerja Pemerintah*

---

### **Article Info**

Received date: 15 Sept. 2023

Revised date: 22 Sept. 2023

Accepted date: 27 Sept. 2023

---

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan (Muluk, 2015:88). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Diantara penentu dalam pembangunan daerah diantaranya adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah ini melingkupi kinerja satuan kerja pemerintahan yang diwujudkan melalui dinas-dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja Pemerintah Daerah harus bisa

dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa Pemerintah Daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi (Mahmudi, 2019:102). Pengukuran kinerja adalah alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta efektifitas organisasi publik. Lembaga-lembaga publik diharapkan memiliki kinerja yang baik, yang ditunjukkan dengan *stewardship* dan akuntabilitas lembaga terhadap sumber daya publik yang dikelolanya (Wahyuni & Rosmida, 2016:99).

Dalam melaksanakan dan mensukseskan kinerja pemerintahan daerah, membutuhkan beberapa faktor. Dengan dilaksanakannya faktor ini, maka kinerja pemerintahan akan dapat terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah juga dapat terlaksana. Menurut Jitmau, yang merupakan faktor dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintahan adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Pemeriksaan Internal. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Sari et al., 2019:276).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana anggaran untuk mempertanggungjawabkan aktifitasnya sebagai bagian dari upaya menjalankan realisasi anggaran. Aktifitas akuntabilitas ini memiliki tujuan untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak yang memberikan mandat (*Principal*) (Mardiasmo, 2018:274). Akuntabilitas (*Accountability*) adalah suatu tindakan wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan sebagai jawaban untuk menerangkan kinerja dari seseorang terhadap organisasi dengan bermuatan hukum didalamnya (M. I. Harahap & Harahap, 2019:279). Maka dari itu, akuntabilitas memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi disebabkan adanya keterkaitan hukum didalamnya. Akuntabilitas dijalankan oleh pihak yang diberikan amanah untuk memberikan penjelasan dari amanah yang diberikan. Amanah memiliki sifat tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga membutuhkan akuntabilitas didalamnya. Si pelaksana amanah bukan hanya berkewajiban untuk menjelaskan, namun juga harus mampu menjawab segala pertanyaan yang diberikan terkait amanah yang diberikan kepada si pemberi mandat.

Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kinerja Pemerintahan juga didukung dengan adanya transparansi organisasi. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2018:2). Adanya kondisi organisasi yang yang terbuka akan mampu memberikan kinerja keuangan yang baik. Hal ini disebabkan seluruh elemen organisasi akan menjaga dan bersatu agar terhindarnya tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Faktor lain yang dapat memberikan dampak pada kinerja pemerintahan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi pegawai adalah suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan pegawai yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan (Adrizayani, 2008:5).

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi pemeriksaan intern. Herawaty (2021:5) menyatakan satuan kerja atau instansi yang berada dan dibentuk didalam dan merupakan bagian organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas atau fungsi pemeriksaan terhadap organisasi pemerintah. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama membentuk pimpinan pemerintah melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pemeriksaan intern pemerintah termasuk pemeriksaan akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan pemerintah di daerah .

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Astuti, 2013:4).

Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemeriksaan internal di Pemerintahan. Hal ini dapat dikarenakan minimnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal yang tidak memadai, sehingga berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan adanya *disclaimer opinion* terhadap beberapa Lembaga pemerintah daerah, dimana diantara kinerja seperti pelaporan keuangan daerah yang masih rendah, sehingga proses audit tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kualitas kinerja yang dibuktikan melalui laporan keuangan tersebut tidak memenuhi standar. (Putri & Akbar, 2022).

Salah satu lembaga yang menjadi wujud pemerintahan daerah adalah di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Lembaga ini merupakan bentuk dari otonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan melalui pertanian. Pada lembaga tersebut harus dianalisis aktifitas kinerja sektor publiknya agar menjadi evaluasi dan peningkatan aktifitas di masa mendatang. Sejak reformasi birokrasi, pengawasan kinerja pemerintahan di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi ketat dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian internal dari Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sudah mulai ditingkatkan. Namun hal ini juga belum berdampak pada kinerja pemerintahan di lingkungan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan asosiatif. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan pengukuran variabel-variabel penelitian yang selanjutnya di analisis secara statistic untuk menentukan hasil penelitian yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan bertempat di Kantor Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jl Kaptan H Desa Damuli Kebun, Kec. Kualuh Selatan Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari tanggapan responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data berupa buku, jurnal, artikel, maupun data lainnya yang berasal dari aktifitas dokumentasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berdasarkan data yang didapatkan dapat diketahui bahwa Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah sekitar 35 orang. Disebabkan jumlah populasi tidak besar, maka teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh yakni menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah sekitar 35 orang. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer (software) SPSS.

## HASIL

### Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dari instrument yang telah disusun sebelumnya. Validitas berasal dari kata *validity* yang memiliki pengertian sebagai indikator mengetahui kecermatan alat ukur yang digunakan dalam melaksanakan fungsinya. Dari pengujian validitas, hanya alat ukur yang memiliki tingkat valid yang tinggi yang dapat digunakan. Sedangkan item pada alat ukur yang memiliki validitas rendah maka harus dibuang atau diganti dengan adanya modifikasi alat ukur. Hasil uji validitas jika nilai positif dan  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka item dapat dinyatakan valid demikian sebaliknya, pengujian validitas konstruk dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah menggunakan korelasi. Adapun nilai dari  $r_{tabel}$  adalah 0.3246, maka hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Validitas**

Variabel	r tabel	r hitung	Kriteria	Hasil
Akuntabilitas (X1)	0.3246	0.401	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.529	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.464	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.356	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.345	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Transparansi (X2)	0.3246	0.713	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.506	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.516	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.616	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.420	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Kompetensi SDM (X3)	0.3246	0.348	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.392	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.337	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.544	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pemeriksaan Internal (X4)	0.3246	0.423	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.530	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.610	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.622	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.516	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Kinerja (Y)	0.3246	0.766	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.384	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.377	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.492	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
	0.3246	0.399	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji validitas pada seluruh item variabel penelitian adalah  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0.3246) dengan taraf signifikan 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas dapat dilihat dari output SPSS pada kolom Cronbach Alpha Tabel Reliability Analysis. Nilai variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai  $> 0,60$ . Adapun hasil dari Uji Realibilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbachs Alpha	Kriteria	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (X1)	0,639	0,600	Reliabel
Transparansi (X2)	0,668	0,600	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0,676	0,600	Reliabel
Pemeriksaan Internal (X4)	0,733	0,600	Reliabel
Kinerja Pemerintah (Y)	0,601	0,600	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh nilai pada variabel penelitian adalah lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil seluruh variabel memiliki reliabilitas.

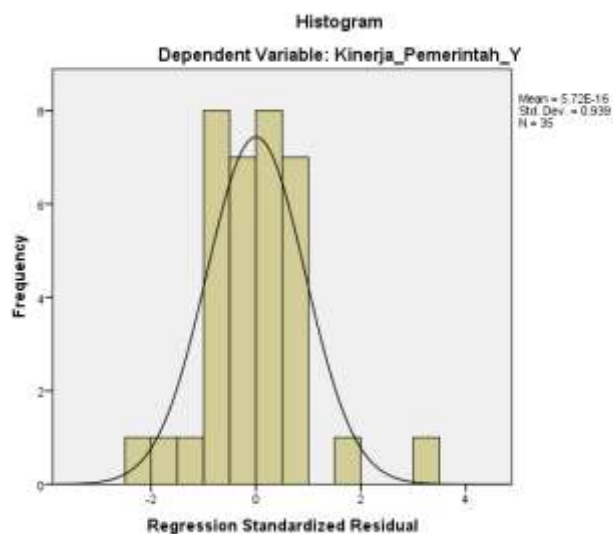
## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Pada uji ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah data yang diuji memiliki distribusi yang normal ataupun tidak. Data yang baik harus memiliki distribusi yang normal sehingga hasil dari data tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Dalam melaksanakan pengujian normalitas data terdiri dari 2 cara sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1) Menggunakan Histogram

Data yang dapat diterima sebagai data yang normal apabila hasil pengujian aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 17,00 for windows menunjukkan grafik histogram yang membentuk titik diagonal. Jika data membentuk diagonal maka data tersebut normal. Sebaliknya, jika data yang memiliki penyebaran acak, maka data tersebut tidak normal. Untuk menentukan uji normalitas juga bisa dilihat dari data Histogram berikut ini:



**Gambar 1. Histogram Normalitas**

Hasil dari histogram menunjukkan gelombang pada Normalitas. Hal ini membuktikan bahwa data pada penelitian ini memiliki distribusi yang normal.

#### 2) Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnow (K-S)

Selain menggunakan histogram, dalam pengujian normalitas juga dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnow (K-S). kriteria dari penerimaan uji ini melalui aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 17,00 for windows yakni table Test of Normality menunjukkan hasil signifikan yang lebih besar daripada 0,05 ( $p > 0,05$ ). Adapun hasil dari uji Normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97808166
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.070
Test Statistic		.128

<sup>1</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021). Hal 110

Asymp. Sig. (2-tailed)	.161
------------------------	------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai Signifikan menunjukkan angka 0.161. sesuai dengan pedoman normalitas bahwa nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki distribusi data yang normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Sebuah persamaan regresi yang baik apabila data tidak memiliki korelasi antara sesama variable independen. Maka pengujian multikolinieritas bermaksud untuk mengetahui apakah antara sesama variable independen memiliki korelasi ataupun tidak. Jika memiliki korelasi, maka data tidak dapat digunakan. Sebaliknya jika sesama variable independen tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Maka data dapat digunakan dan diolah untuk mendapatkan model regresi yang diharapkan. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF menggunakan persamaan  $VIF = 1/\text{tolerance}$ . Jika nilai  $VIF < 10$  maka tidak terdapat Multikolinieritas. Adapun hasil dari uji Multikolinieritas dapat dilihat pada hasil berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas_X1	.579	1.726
Transparansi_X2	.574	1.742
Kompetensi_SDM_X3	.875	1.143
Pemeriksaan_Internal_X4	.856	1.168

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah\_Y

Sumber: Output SPSS, 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada ketiga variabel memiliki nilai tolerance  $> 0.1$  dan nilai VIF memiliki nilai  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada persamaan regresi yang dihasilkan.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki pengertian untuk mengetahui model regresi tidak memiliki kesamaan variabel dari residual dengan pengamatan lainnya. Data pengamatan yang memiliki residual yang berbeda, maka data tersebutlah yang disebut dengan.<sup>2</sup> Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heterokedastisitas dan sebaliknya bila tidak mengandung heterokedastisitas. Adapun hasil dari uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

			Correlations				
			Akuntabilitas_X1	Transparansi_X2	Kompetensi_SDM_X3	Pemeriksaan_Internal_X4	Unstandardized Residual
Spearman's rho	1	Correlation Coefficient	1.000	.457**	.372*	.066	.030
		Sig. (2-tailed)	.	.006	.028	.708	.865
		N	35	35	35	35	35
	2	Correlation Coefficient	.457**	1.000	.236	-.276	.073
		Sig. (2-tailed)	.006	.	.172	.109	.678
		N	35	35	35	35	35

<sup>2</sup>Ibid. hal.105



Kompetensi_SD M_X3	Correlation	.372*	.236	1.000	.095	.011
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	.028	.172	.	.586	.949
	N	35	35	35	35	35
Pemeriksaan_In ternal_X4	Correlation	.066	-.276	.095	1.000	.071
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	.708	.109	.586	.	.687
	N	35	35	35	35	35
Unstandardized Residual	Correlation	-.030	.073	.011	-.071	1.000
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	.865	.678	.949	.687	.
	N	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS, 2023

Dari data di atas dapat dilihat pada kolom residual memiliki nilai Signifikan pada seluruh variabel di atas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel memiliki tidak gejala heteroskedastis. Sehingga layak digunakan dalam pengujian analisis regresi berganda

### Analisis Persamaan Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan sebab akibat dari variable dependen dan independen. Pada analisis regresi berganda, maka variable independen terdiri lebih dari 1 variabel dalam memberikan pengaruhnya kepada variabel dependen. Hubungan sebab akibat ini dapat berbentuk positif dan negative tergantung dari kondisi sebenarnya. Analisis model regresi berganda menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja

$\beta_0$  = Konstan aregresi

$\beta_1 X_1$  = Koefisien regresi variable Akuntabilitas

$\beta_2 X_2$  = Koefisien regresi variable Transparansi

$\beta_3 X_3$  = Koefisien regresi variable Kompetensi SDM

$\beta_4 X_4$  = Koefisien regresi variable Pemeriksaan Internal

e = Variabel pengganggu

Adapun hasil dari uji regresi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Persamaan Regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.982	5.950		3.190	.003
Akuntabilitas_X1	.132	.282	.112	.468	.003
Transparansi_X2	.058	.269	.052	.217	.000
Kompetensi_SDM_X3	.093	.201	.090	.463	.005
Pemeriksaan_Internal_X4	.003	.147	.004	.020	.984

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah\_Y

Sumber: Output SPSS, 2023

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa Persamaan Regresi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

$$Y = 18,982 + 0,132X_1 + 0,058X_2 + 0,093X_3 + 0,003X_4$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- Nilai koefisien Konstant adalah 18,982 dan bernilai positif. Nilai ini bermakna bahwa jika variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemeriksaan Internal memiliki nilai 0, maka nilai Kinerja Pemerintahan (Y) adalah 18,982 satuan.

- b. Nilai Koefisien Akuntabilitas (X1) adalah 0,132 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Akuntabilitas di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi Kinerja Pemerintahan (Y) menjadi 0,132 satuan.
- c. Nilai koefisien Transparansi (X2) adalah 0,058 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Transparansi di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1 satuan, maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan (Y) sebesar 0,058 satuan.
- d. Nilai koefisien Kompetensi SDM (X3) adalah 0,093 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Kompetensi SDM Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan (Y) sebesar 0,093 satuan.
- e. Nilai koefisien Pemeriksaan Internal (X4) adalah 0,003 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Pemeriksaan Internal di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan (Y) sebesar 0,003 satuan.

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (T)

Uji t atau juga dikenal dengan uji parsial adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual ataupun masing-masing. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau pada level 5% (0,05). Adapun hasil dari uji parsial adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.982	5.950		3.190	.003
Akuntabilitas_X1	.132	.282	.112	.468	.003
Transparansi_X2	.058	.269	.052	.217	.000
Kompetensi_SDM_X3	.093	.201	.090	.463	.005
Pemeriksaan_Internal_X4	.003	.147	.004	.020	.984

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah\_Y

Sumber: Output SPSS, 2022

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel memiliki nilai yang berbeda. Adapun hasil menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Nilai uji parsial variabel Akuntabilitas (X1) pada nilai signifikan adalah 0,003 ( $p < 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.
- 2) Nilai uji parsial variabel Transparansi (X2) pada nilai signifikan adalah 0,000 ( $p < 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.
- 3) Nilai uji parsial variabel Kompetensi SDM (X3) pada nilai signifikan adalah 0,005 ( $p < 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.
- 4) Nilai uji parsial variabel Pemeriksaan Internal (X4) pada nilai signifikan adalah 0,984 ( $p > 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

#### b. Uji Simultan (F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati, dasar pengambilan



keputusannya adalah dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi 5% (0.05) dengan kriteria sebagai berikut: Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.536	4	.384	5.87	.000
	Residual	133.035	30	4.435		
	Total	134.571	34			

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah\_Y

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan\_Internal\_X4, Akuntabilitas\_X1, Kompetensi\_SDM\_X3, Transparansi\_X2

Sumber: Output SPSS, 2022

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai uji simultan adalah 0.000 yang bermakna memiliki nilai  $p < 0.05$ . Maka berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

### c. Koefisien Determinasi

Dalam analisis regresi berganda, pengujian juga meliputi besaran pengaruh yang diberikan oleh seluruh variable independen kepada variable dependen. Uji ini disebut dengan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pada *Statistical Package for Social Science (SPSS) 17.00 for windows*, nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *R Squared*. Kriteria dari koefisien determinasi apabila nilainya semakin mendekati dari 1 maka dapat diketahui pengaruhnya semakin kuat. Sebaliknya, jika semakin menjauhi dari nilai 1 maka nilai pengaruhnya adalah lemah. Adapun hasil dari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 <sup>a</sup>	.646	.633	1.88427

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan\_Internal\_X4, Akuntabilitas\_X1, Kompetensi\_SDM\_X3, Transparansi\_X2

b. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah\_Y

Sumber: Output SPSS, 2023

Dari hasil output pada Koefisien Determinasi pada kolom R Square mendapatkan nilai 0.633. nilai koefisien determinasi diubah dalam persentase menjadi 63.3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 35,4% dari Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara dipengaruhi oleh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan Internal. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara

Dalam melaksanakan dan mensukseskan kinerja pemerintahan daerah, membutuhkan beberapa faktor. Dengan dilaksanakannya faktor ini, maka kinerja pemerintahan akan dapat terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah juga dapat terlaksana. Menurut Jitmau, yang merupakan faktor dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintahan adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Pemeriksaan Internal. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Sari et al., 2019:276).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana anggaran untuk mempertanggungjawabkan aktifitasnya sebagai bagian dari upaya menjalankan realisasi anggaran. Aktifitas akuntabilitas ini memiliki tujuan untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak yang memberikan mandat (*Principal*) (Mardiasmo, 2018:274). Akuntabilitas (*Accountability*) adalah suatu tindakan wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan sebagai jawaban untuk menerangkan kinerja dari seseorang terhadap organisasi dengan bermuatan hukum didalamnya (M. I. Harahap & Harahap, 2019:279). Maka dari itu, akuntabilitas memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi disebabkan adanya keterkaitan hukum didalamnya. Akuntabilitas dijalankan oleh pihak yang diberikan amanah untuk memberikan penjelasan dari amanah yang diberikan. Amanah memiliki sifat tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga membutuhkan akuntabilitas didalamnya. Si pelaksana amanah bukan hanya berkewajiban untuk menjelaskan, namun juga harus mampu menjawab segala pertanyaan yang diberikan terkait amanah yang diberikan kepada si pemberi mandat.

Hasil analisis deskriptif menyatakan bahwa kondisi akuntabilitas di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki kondisi yang Baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian dari tanggapan responden adalah 129,8 dengan kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara telah memiliki akuntabilitas sehingga memberikan tanggapan yang baik bagi para pekerja. Adapun diantara indikator akuntabilitas yang paling tinggi didapatkan oleh item yang berbunyi Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara bertanggung jawab dan menindaklanjuti penilaian masyarakat terhadap kinerjanya. Pada item ini mendapatkan skor 140 dengan kriteria baik. Sedangkan pada indikator akuntabilitas dengan capaian yang paling rendah adalah item yang berbunyi Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.. pada item ini mendapatkan skor 122 dengan kriteria yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara terletak pada pelayanannya.

Hasil analisis regresi dan uji hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil positif dari analisis regresi dan uji hipotesis. Sehingga jika akuntabilitas ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

Adapun hasil yang didapatkan ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang disampaikan oleh penelitiannya Syawaluddin (2021) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. Menyatakan bahwa adanya peran dari akuntabilitas akan memberikan dampak peningkatan yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Semakin besar peningkatan yang terjadi pada instansi terkait dengan akuntabilitasnya, maka akan secara langsung memberikan dampak kinerja akan menjadi semakin baik.

Adapun yang membedakan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimanapada penelitian terdahulu menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari faktor akuntabilitas dalam mempengaruhi kinerja pemerintahan. Sedangkan hasil dari penelitian ini menyatakan sebaliknya, bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Analisis menyatakan bahwa Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki kondisi akuntabilitasnya yang sudah memenuhi standar keuangan pemerintahan. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan publik, namun secara umum akuntabilitas ini sudah dirasa cukup baik. Maka dari itu, hal inilah yang mempengaruhi kinerja pemerintah di Dinas Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Dengan memberikan kepercayaan masyarakat melalui sikap yang akuntabel, maka akan meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara menjadi lebih baik.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara**

Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kinerja Pemerintahan juga didukung dengan adanya transparansi organisasi. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2018:2). Adanya kondisi organisasi yang terbuka akan mampu memberikan kinerja keuangan yang baik. Hal ini disebabkan seluruh elemen organisasi akan menjaga dan bersatu agar terhindarnya tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Hasil analisis deskriptif menyatakan bahwa tingkat transparansi pada Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara berada pada kondisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian dari skor pada variabel tersebut adalah 131,2 dengan predikat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki transparansi dalam operasional kerjanya. Adapun indikator yang paling dominan dari variabel ini adalah item yang berbunyi Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki Sosial Media, Website, dan Company Profile yang memudahkan masyarakat mengakses informasi. Pada item ini memiliki capaian skornya adalah 146 dengan predikat baik. Sedangkan indikator dengan capaian yang paling rendah didapatkan dari item yang berbunyi Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memberikan laporan keuangan dan kegiatannya kepada Masyarakat dan masyarakat secara rutin. Pada item ini mendapatkan skor 122 dengan kriteria baik. Kondisi ini bisa terjadi disebabkan memang adanya kekurangan dari Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara yang kurang memberikan pelaporan aktifitas dan transparansi kepada masyarakat secara umum.

Hasil analisis menyatakan bahwa nilai koefisien Transparansi ( $X_2$ ) adalah 0,058 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Transparansi di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1%, maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan ( $Y$ ) sebesar 0,058%. Nilai uji parsial variabel Transparansi ( $X_2$ ) pada nilai signifikan adalah 0,000 ( $p < 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika terdapat peningkatan pada transparansi akan memberikan dampak peningkatan juga pada kinerja pemerintahan.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Putri & Akbar, 2022) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya. Hasil menyatakan bahwa kinerja OPD Kota Surabaya tidak memiliki ketergantungan terhadap transparansi dalam aktifitas peningkatannya.

Adanya perbedaan hasil yang mana pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun pada penelitian ini transparansi akan memberikan pengaruh kepada kinerja secara signifikan. Hal ini disebabkan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara senantiasa meningkatkan transparansi instansi melalui pembuatan website dinas yang harapannya akan meningkatkan kepercayaan dan akses informasi. Adanya peningkatan dari transparansi ini akan menyebabkan kinerja pemerintahan akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, yang mana organisasi pemerintahan akan semakin tertutup dan tidak transparan akan menyebabkan rendahnya kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara .

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara**

Faktor lain yang dapat memberikan dampak pada kinerja pemerintahan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi pegawai adalah suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan pegawai yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan (Adrizayani, 2008:5).

Berdasarkan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa kondisi kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki kesesuaian dengan tugas yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan capaian skor dari variabel tersebut adalah 135,4 dan predikatnya baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki pegawai yang berkompeten dalam bekerja. Adapun indikator kompetensi SDM yang paling dominan adalah indikator pengetahuan. Adapun itemnya adalah Karyawan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Adapun item ini mendapatkan skor 156 dengan predikatnya sangat baik. Sedangkan indikator yang paling rendah adalah efektif dan

efisien kerja yang dibuktikan dengan item Karyawan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas menjadi efektif dan efisien. Adapun pada indikator tersebut mendapatkan skor 126 dengan predikatnya baik.

Hasil menyatakan bahwa koefisien Kompetensi SDM (X3) adalah 0,093 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Kompetensi SDM Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1% maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan (Y) sebesar 0,093%. Hasil uji parsial variabel Kompetensi SDM (X3) pada nilai signifikan adalah 0,005 ( $p < 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

Didapatkanlah hasil penelitian bahwa Kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu oleh Abdul Aziz (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah. Disampaikan bahwa adanya kualitas staf yang baik tidak akan memberikan dampak kualitas kinerja keuangannya yang juga akan semakin baik.

Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa adanya pengaruh yang berbeda. Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintahan.

Pada sisi kompetensi sumber daya manusia, saat ini staf yang bertugas di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara adalah tenaga kerja yang memiliki kualitas dan sesuai dengan kompetensi pendidikannya. Hal ini dibuktikan dengan seleksi Pegawai yang menjadi syaratnya adalah memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan deskripsi kerja pegawai tersebut. Hal ini membuktikan bahwa di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik. Semestinya dari hal tersebut memberikan dampak yang signifikan pada kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sebab hasil menyatakan jika kompetensi Sumber daya manusia ini ditingkatkan, maka akan menyebabkan kinerja pemerintahan akan semakin baik. Sebaliknya, jika pegawai tidak memiliki kompetensi yang sesuai, maka kinerja akan semakin menurun.

### **Pengaruh Fungsi Pemeriksaan terhadap Kinerja Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara**

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi pemeriksaan intern. Herawaty (2021:5) menyatakan satuan kerja atau instansi yang berada dan dibentuk didalam dan merupakan bagian organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas atau fungsi pemeriksaan terhadap organisasi pemerintah. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama membentuk pimpinan pemerintah melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pemeriksaan intern pemerintah termasuk pemeriksaan akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan pemerintah di daerah .

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Astuti, 2013:4).

Berdasarkan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa menurut para pekerja Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara adalah Baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian skor 1296. Selain itu kategori yang didapatkan adalah baik. Adapun indikator yang paling tinggi adalah *akuntability* yang dibuktikan melalui pernyataan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki aktifitas keuangan yang akuntabel. Pada indikator tersebut mendapatkan skor 138 dan predikatnya baik. Sedangkan indikator yang paling rendah adalah ketanggapan yang dibuktikan melalui item Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara memiliki aktifitas keuangan yang akuntabel. Pada indikator tersebut memiliki capaian 123 dan predikatnya baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah memiliki kekuatan pada akuntabilitasnya, namun lemah pada ketanggapan dalam memberikan pelayanan.

Hasil dari koefisien Pemeriksaan Internal (X4) adalah 0,003 bermakna bahwa jika terdapat peningkatan pada Pemeriksaan Internal di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sebesar 1% maka akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Pemerintahan (Y) sebesar 0,003%. Hasil uji parsial variabel Pemeriksaan Internal (X4) pada nilai signifikan adalah 0,984 ( $p > 0.05$ ). Nilai ini menyatakan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

Hasil didapatkan bahwa Pemeriksaan Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika pemeriksaan internal tidak akan memberikan dampak terhadap kinerja.

Hasil ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Ade dan Yuyun (2017) yang menyatakan bahwa hasil pengujian di RSUD Kota Banjar menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan audit internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pemeriksaan internal.

Hasil yang menyatakan tidak adanya pengaruh ini, menurut analisis peneliti disebabkan pemeriksaan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Masih terdapat kekurangan pada pemeriksaannya sehingga belum mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Sejak reformasi birokrasi, pengawasan kinerja pemerintahan di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi ketat dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian internal dari Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara sudah mulai ditingkatkan. Namun hal ini juga belum berdampak pada kinerja pemerintahan di lingkungan Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Diduga permasalahan dari kinerja bukan terletak pada rendahnya pengawasan dan pemeriksaannya. Namun adanya faktor lain yang lebih dominan seperti akuntabilitas, transparansi dan kompetensi SDM. Hal inilah yang menyebabkan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa walaupun pemeriksaan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara ditingkatkan, maka belum mampu memberikan peningkatan kinerja secara signifikan.

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Fungsi Pemeriksaan Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.**

Dari hasil penelitian nilai uji simultan adalah 0.000 yang bermakna memiliki nilai  $p < 0.05$ . Maka berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara.

Pada Koefisien Determinasi pada kolom R Square mendapatkan nilai 0.646. nilai koefisien determinasi diubah dalam persentase menjadi 64,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 35,4% dari Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara dipengaruhi oleh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan Internal. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

Hasil ini didukung oleh penelitian Sari (2019) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan mensukseskan kinerja pemerintahan daerah, membutuhkan beberapa faktor. Dengan dilaksanakannya faktor ini, maka kinerja pemerintahan akan dapat terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah juga dapat terlaksana. Menurut Jitmau, yang merupakan faktor dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintahan adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Pemeriksaan Internal. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada hasil simultannya. Pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, kompetensi SDM, dan Pemeriksaan internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintahan. Sedangkan pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa adanya transparansi publik tidak dapat menjamin peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun dengan adanya akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksaan intern didalam lingkup pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada tingkat kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.



## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika terdapat peningkatan akuntabilitas, maka akan mampu memberikan dampak peningkatan pada kinerja pemerintahannya.
2. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan transparansi maka akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika terdapat peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, maka akan mampu memberikan dampak peningkatan pada kinerja pemerintahannya.
4. Pemeriksaan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Sehingga jika walaupun pemeriksanaan internal dilaksanakan secara intensif, maka tidak akan memberikan perubahan pada kinerja pemerintahannya.
5. Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintahan di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara. Adapun besar pengaruh dari koefisien determinasinya adalah 64,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan berada pada kondisi yang kuat.

## SARAN

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pelayanan kepada masyarakat dan profesionalitas kerja.
2. Agar Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara dapat meningkatkan transparansi publik melalui pelaporan aktifitas kegiatan dan keuangan di website maupun media informasi lainnya.
3. Agar Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara dapat memberikan pelatihan kepada pegawai dalam meningkatkan efisiensi kerja sehingga menghasilkan kompetensi SDM yang baik.
4. Agar pemeriksanaan internal dilaksanakan secara kontinyu untuk mendapatkan hasil yang baik.

## Referensi

- Abdullah, M. W. (2020). *Akuntansi Syariah (Isu, Konsep, dan Refleksi)*. Gowa: Pusaka Al-Maida.
- Adrizayani, S. (2008). Rekrutmen Sumber Daya Manusia. *Sistem Informasi SDM - 3*, 1–5.
- Akmal. (2019). *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit Edisi Kedua*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Arif, M. N. R. Al. (2015). Teori Mikro Ekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Jurnal Muamalah, Volume 5*(Nomer 4), 1–12.
- Astuti, R. M. (2013). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan). *Naskah Publikasi FEB UMSU*.
- Azwar. (2015). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dianty, R. N. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Hotel Edotel Syariah Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Ekonomi*.
- Erlina. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghazali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *Al-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 5*(1), 67–82.
- Harahap, R. D. (2020). Akuntansi Syariah. *Diktat Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 298.
- Herawaty, H. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende). *Skripsi Universitas Flores*.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi



- Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Juni, D. P. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Liu, M. S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi Akuntansi Atmajaya Yogyakarta*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ket). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Muluk, M. khairul. (2015). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: PT. Bayu Media.
- Nordiawan, D. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25.
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sari, P. F. N. P., Sumariani, N. W. W., Cahayani, N. K. R., & Dewi, K. Y. W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19963>
- Simamora, H. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIEY.
- Sinambela, P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syabri, B. A. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 979–991.
- Syafina, L. (2018). *Panduan penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan: Febi Press.
- Tunggal, A. W. (2018). *Pokok-Pokok Audit Internal*. Jakarta: Harvarindo.
- Wahyuni, E. S., & Rosmida, R. (2016). Analisis Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v4i2.74>